

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BANDAR LAMPUNG

**Oleh
OCA PATRYCIA**

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, salah satu komponen pajak pajak progresif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah implementasi kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Bandar Lampung?" Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Bandar Lampung berdasarkan Teori Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan birokrasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengambil informan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Samsat Rajabasa dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Samsat Bandar Lampung, yaitu: (1) Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. Secara internal dengan cara melakukan koordinasi di dalam organisasi Samsat guna melaksanakan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor. (2) Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. (3) Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. (4) Birokrasi dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di Samsat Bandar Lampung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Progresif